

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMBANGUNAN NON FISIK
DI DESA MEKARHARJA KECAMATAN PURWAHARJA
KOTA BANJAR**

Taka Paniagih¹, Agus Dedi², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: takapaniagih98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya ketertarikan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan bidang sumber daya manusia berupa penyuluhan, masyarakat kurang mengikuti anjuran pemerintah desa dalam pembangunan kesehatan dan masyarakat kurang mempercayai pelaksana kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Hal tersebut diduga disebabkan oleh belum optimalnya Kepala Desa dalam menerapkan gaya kepemimpinannya seperti kurang memahami kondisi dan masalah yang terjadi di masyarakat, kurang menjadi suriteladan dan memperhatikan kondisi masyarakat dan kurang menerima saran dan masukan dari masyarakat. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar? 2) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik? 3) Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik?

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 90 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif meliputi menentukan rentang, persentase, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: 1) Gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik. 2) Partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik. 3) Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dari hasil uji hipotesis diperoleh hitung sebesar 12,121 > dari tabel sebesar 1.661, maka hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan, Partisipasi, Pembangunan Non Fisik.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Selain itu Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri.

Dalam konteks pembangunan terdapat dua jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Meidiani, 2013: 520). Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Meidiani, 2013: 521). Pembangunan non fisik meliputi pembangunan kualitas masyarakat di pedesaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa dan pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan non fisik desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat. Program pembangunan non fisik desa meliputi program

pengembangan sumber daya manusia seperti pemberdayaan masyarakat pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, memerlukan anggaran, sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kelancaran pembangunan desa. Anwar, (2012: 84) menyatakan bahwa:

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.

Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama strategi yang diterapkan adalah melalui strategi penyadaran. (Rukminto, 2013:206).

Konsekuensi dari kenyataan tersebut, kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai

bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi searah dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya, dalam kondisi sedemikian terhadap kesukarelaan atau induksi pemenuhan kerelaan bawahan terhadap pemimpin khususnya dalam usaha mencapai tujuan bersama, dan pada proses pemecahan masalah-masalah yang harus dihadapi secara kolektif jadi tidak diperlukan pemaksaan, pendesakan, penekanan, intimidasi, ancaman atau paksaan tertentu (Kartono, 2013:153).

Menurut Heidjrachman dan Husnan dalam Frengky Basna (2016:320) bahwa :

Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Kepemimpinan Kepala Desa sangat penting untuk membina sikap partisipasi masyarakat. Kepemimpinan kepala desa akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut antara lain berupa tanggapan kesediaan dan

keterlibatannya dalam pembangunan. Apabila hal ini dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan maka pada gilirannya tujuan pembangunan yang dicita-citakan akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Masyarakat di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dalam berpartisipasi dalam pembangunan non fisik seperti penyelenggaraan pemberdayaan, penyuluhan, gerakan kebersihan, musyawarah dan lain sebagainya terlihat masih rendah, karena kesibukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat lebih mementingkan untuk mencari nafkah dari pada untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Masyarakat terlihat kurang memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga dan peralatan serta kurang dapat menggerakkan masyarakat yang lain untuk ikut bergotong royong dalam proses pembangunan.

Kepemimpinan Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pengaruh agar masyarakat peduli dan mau berpartisipasi pada semua program yang ada di desa. Namun pada kenyataannya pemimpin justru sibuk dengan urusan pribadinya dibandingkan dengan urusan rakyatnya, sehingga rakyat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desanya. Akibatnya pembangunan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum merata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar

ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Masyarakat kurang tertarik dalam kegiatan pemberdayaan bidang sumber daya manusia berupa penyuluhan yang diselenggarakan pemerintah desa, masyarakat beranggapan kegiatan tersebut tidak akan memperbaiki mutu hidupnya, masyarakat lebih menginginkan bantuan permodalan untuk usaha. Contoh, masyarakat tidak menghadiri undangan kegiatan penyuluhan bidang pertanian di balai desa, masyarakat lebih mementingkan melaksanakan pekerjaannya masing-masing
2. Masyarakat kurang mengikuti anjuran pemerintah desa dalam pembangunan kesehatan untuk menjaga kebersihan lingkungan di desa. Contoh, masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan opsh bersama-sama yang diselenggarakan setiap minggu
3. Masyarakat kurang mempercayai pelaksana kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. Contoh, masyarakat tidak menghadiri kegiatan musrenbangdes dengan alasan setiap usulan yang disampaikan tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik tersebut diduga oleh belum

optimalnya Kepala Desa dalam menerapkan gaya kepemimpinannya di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, seperti terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kepala desa kurang peka terhadap keinginan dan kebutuhan dan memperhatikan kondisi masyarakat. Contoh, Kepala Desa mengabaikan usulan masyarakat atas keinginan dan kebutuhannya dan kurang memperdulikan jika ada masyarakat yang mengalami musibah seperti sakit dan kecelakaan.
2. Kepala Desa kurang memahami kondisi dan masalah yang terjadi di masyarakat. Contoh, Kepala Desa tidak melakukan tindakan untuk menenangkan masyarakat dan mengambil langkah-langkah dalam menghadapi pandemi covid-19 saat ini.
3. Kepala Desa kurang menerima saran dan masukan dari masyarakat dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa. Contoh, kepala desa kurang mempertimbangkan pendapat dan usul masyarakat terkait bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di

- Desa Mekarharja Kecamatan Purwarharja Kota Banjar?
3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwarharja Kota Banjar?.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Gaya Kepemimpinan

Sudaryono, (2014:200) mengemukakan bahwa: “Gaya kepemimpinan merupakan suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu”.

Dalam penelitian ini teori gaya kepemimpinan mengacu pada pendapat Rivai (2014:42) yang menyatakan bahwa:

Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang

sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya.

Berdasarkan teori di atas bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi yang meliputi falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang diterapkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi kinerja bawahannya.

2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pembangunan sendiri secara umum yaitu peran serta masyarakat untuk ikut mengambil andil dalam proses pembangunan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik.

Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Theresia (2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektivitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

3. Pengertian Pembangunan Non Fisik

Konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan-kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan. Rochajat, dkk, (2011:3) bahwa:

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan

demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan di masing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.

Menurut Sumitro (2005:98), pembangunan didefinisikan sebagai berikut "Pembangunan adalah segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi kebutuhannya secara layak

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis

Sampel yang digunakan adalah sebanyak 90 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi studi kepustakaan, studi lapangan (angket, wawancara dan observasi). Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dilakukan melalui pengolahan data hasil angket yang ditabulasikan dan dideskripsikan

ke dalam tabel distribusi frekuensi, analisis korelasi, determinasi dan uji signifikansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar

Berdasarkan hasil rekapitulasi tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar diperoleh total skor untuk variabel X (gaya kepemimpinan Kepala Desa) sebesar 2830, dengan rata-rata skor sebesar 238,33 berada pada kategori cukup baik, jika dipersentasekan sebesar 53,96%, artinya gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik.

Dengan demikian gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar telah sesuai dengan pola perilaku dan strategi pemimpin menurut Rivai (2014:42) yaitu falsafah, keterampilan, sifat dan sikap.

a. Falsafah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa dalam memahami masalah yang terjadi menyangkut kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa masih terlihat kurang mampu untuk memahaminya. Kemudian kepala desa dalam mengambil sikap dan tindakan telah menunjukkan sikap dan perilakunya yang dapat dikatakan cukup bijak, hal ini seperti terlihat dari pengambilan

keputusan dengan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

Selanjutnya kepala desa masih kurang memiliki orientasi ke masa depan. Hal ini seperti kepala desa dalam merencanakan pembangunan belum dilakukan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

b. Keterampilan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat di kantor pemerintah desa masih terlihat sering bertanya pada perangkat desa mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintah desa secara administrasinya terutama terkait dengan mekanisme dan prosedurnya. Kemudian wawasan dan pengetahuan yang dimiliki kepala desa terkadang kurang dapat diterapkan dalam suasana bekerja seperti dalam menciptakan suasana yang kondusif selama ini masih terlihat adanya ketegangan-ketegangan antar perangkat desa.

Selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaannya dilingkungan pemerintah desa terlihat masih kurang adanya hubungan yang harmonis dan jalinan kerja sama antara kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat. Contoh kurang terjalinnya komunikasi dan kerjasama dengan perangkat desa sehingga timbul sikap saling mengandalkan atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dan tumbuhnya sikap individualistis yang

lebih mementingkan kepentingan sendiri.

c. Sifat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki kepala desa tentunya telah cukup memadai untuk dalam melaksanakan pekerjaannya, kepala desa terlihat telah mengetahui bagaimana seorang pimpinan dalam mengelola organisasinya baik secara administrasi dan teknis, hal ini dilakukan agar dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu hasil yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Kemudian kepala desa masih kurang dapat menunjukkan sikap dan tindakan yang konsekuen. Hal ini ditunjukkan dengan kurang konsistennya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepala desa. Selanjutnya dalam hal kepemimpinannya kepala desa masih terlihat kurang memberikan contoh dan suriteladan bagi perangkat desa dan masyarakatnya seperti kurangnya sikap disiplin waktu ketika datang ke kantor.

d. Sikap

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa terkadang kurang bersikap demokratis dalam mengambil keputusan selama ini kepala desa kurang melibatkan perangkat desanya untuk bermusyawarah sehingga keputusan yang diambil hanya keputusan sepihak. Kemudian kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menyelesaikan masalah terkadang kurang menerima masukan

dan kritikan dari bawahan dan masyarakat, kepala desa kurang mempertimbangkan saran dan kritikan dari perangkat desa dan masyarakat sehingga keputusan yang diambil kurang dapat diterima semua pihak.

Selanjutnya kepala desa terlihat kurang memiliki kedekatan dan hubungan yang saling bersinergi dengan perangkat desa. Hal ini seperti kurangnya komunikasi dengan perangkat desa.

2. Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Non Fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar

Berdasarkan hasil rekapitulasi tentang partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar diperoleh skor total 3460, dengan rata-rata skor sebesar 247,14 berada pada kategori sedang, jika dipersentasekan sebesar 54,92%, artinya partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik.

Dengan demikian partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar telah melaksanakan tiga unsur pokok tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Theresia (2014: 207) yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan

adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

a. Adanya Kesempatan yang Diberikan kepada Masyarakat, untuk Berpartisipasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat terlihat banyak yang tidak mengetahui program pembangunan non fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, informasi terkait berbagai pelaksanaan program pemerintah desa kurang diberikan pada masyarakat. Kemudian pemerintah desa kurang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat di untuk menyampaikan usul dan masukan-masukan terkait dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa masih terlihat kurang diikuti oleh unsur masyarakat seperti dalam kegiatan musrenbang desa setiap tahunnya.

Selanjutnya masyarakat terlihat masih kurang aktif dalam menilai keputusan yang ditetapkan kepala desa, selama ini masyarakat kurang diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat atas keputusan dan kebijakan yang ditetapkan kepala desa.

b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memberikan kepercayaan pada pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan non fisik, masyarakat banyak yang terlihat kurang memperdulikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Kemudian masyarakat masih terlihat

kurang memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa kurang dapat memperbaiki mutu hidup masyarakat.

Selanjutnya dengan selesainya pelaksanaan program-program pembangunan terlihat memang pemerintah desa merasa puas atas terselesaikannya pembangunan tersebut, terkadang kurang memperhatikan manfaat yang akan diperoleh atas hasil pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian pemerintah desa dengan masyarakat terkadang kurang bersinergi dan membangun kebersamaan seperti masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan masih kurang. Dan pemerintah desa dan masyarakat telah memiliki sikap kemandirian atau kepercayaan diri atas kemampuan untuk memperbaiki mutu hidupnya.

c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat terlihat masih memiliki kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun seperti kurang memiliki perhatian pada hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang peluang untuk membangun sehingga masyarakat selalu memperhatikan terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan berbagai pembangunan tentunya masyarakat pada dasarnya

telah memiliki kemampuan, masyarakat memiliki perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan yang dilaksanakan dan terlihat masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan seperti terhadap hasil pembangunan masyarakat memiliki kepedulian untuk memperbaiki hasil pembangunan.

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Non Fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar

Berdasarkan hasil korelasi *product moment* di peroleh nilai korelasi *product moment* sebesar 0,7908 antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi masyarakat. Koefisien korelasi sebesar 0,7908 termasuk pada kriteria kuat, jadi terdapat hubungan yang kuat antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dengan menghitung besarnya koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan, maka dihitung koefisien determinasi sebesar 62,54%, Artinya 62,54% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Sedangkan sisanya sebesar 37,46% adalah dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan mata pencaharian.

Dari koefisien determinasi sebesar 62,54% tersebut menunjukkan tingkat pengaruhnya adalah tinggi/kuat.

Artinya bahwa koefisien determinasi sebesar 62,54% tersebut tingkat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat yaitu tinggi/kuat.

Untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan maka penulis membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk mencari t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95 % dengan $\alpha = 0,5$ dan untuk $n = 90$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1.661. Karena t_{hitung} sebesar 12,121 > dari t_{tabel} sebesar 1.661. Maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar, dapat diterima.

Dengan demikian bahwa kepemimpinan merupakan faktor utama dalam menentukan suatu tujuan yang akan dicapai. Kepemimpinan adalah suatu alat atau proses untuk mempengaruhi orang agar bersedia melakukan suatu tindakan secara sukarela. Selain itu gaya dari seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dari yang dipimpin dalam artian seorang pemimpin akan menjadi panutan, maka dari itu seorang pemimpin harus menjadi panutan yang baik.

Pola kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang atau lebih yang menggunakan pengaruh, wewenang atau kekuasaan terhadap orang lain dalam menggerakkan mereka guna mencapai tujuan. Cara seorang memimpin akan

menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pembangunan khususnya. Apabila partisipasi masyarakat sudah baik maka akan dengan mudah mencapai suatu keberhasilan dalam pembangunan, namun semua itu harus didorong dengan kemampuan seseorang pemimpinnya. Oleh karena itu pemimpin harus memimpin masyarakat melalui pola kepemimpinan serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dan demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Seorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan individu dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi.

Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Keterlibatan atau keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam

memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibatan secara fisik atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil program pembangunan itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik.
2. Partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berada pada kategori cukup baik.
3. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan non fisik di Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dari hasil uji hipotesis diperoleh t_{hitung} sebesar 12,121 > dari t_{tabel} sebesar 1.661, maka hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2005). *Ketimpangan pembangunan wilayah dan pedesaan*. P4W. Bogor
- Frengky Basna. (2016), *Analisis Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan*

- Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Manado.* Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 3
- Kartono dan Kartini, (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu?*, edisi pertama, PT Rajawali, Jakarta
- Meidiani, Tri. (2013). *Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Malinau.* Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 1, No. 1
- Mulyadi. (2009). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen.* Jakarta: Salemba Empat
- Rivai Veithzal. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rochajat Harun. Dkk. (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis.* Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rukminto Isbandi Adi. (2013), *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaryono. (2014). *Budaya dan Perilaku Organisasi.* Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Sumitro Djojohadikusumo, (2005). *Ekonomi Pembangunan,* Jakarta: Pustaka Ekonomi. Universitas Sumatera Utara
- Theresia Aprillia dkk, (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat,* Bandung, Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa